

**DARI *PACHT* PASAR KE *PASARFONDS*:
PASAR PONTIANAK DALAM KEBIJAKAN EKONOMI
KOLONIAL BARU PADA AWAL ABAD XX**

***FROM PACHT PASAR TO PASARFONDS:
PASAR PONTIANAK IN THE NEW COLONIAL ECONOMIC POLICY
AT THE EARLY OF TWENTIETH CENTURY***

Dana Listiana

Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak, Jalan Letjen Sutoyo, Pontianak
Pos-el: dana.listiana@gmail.com/dna_listy@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research discusses about Pasar Pontianak in the changing of management system during colonial time. The purpose of this research is to analyze the background for deleting pacht pasar in 1919 and the effect after being directly handled by the local government through pasarfonds. To do the research, historical research method was used. The result of this research shows that the changing in the system was caused by the increasing number of workers and colonial government's worries of the new political power based upon the economic strength of Tionghoa society as a main drive to trading in market. Meanwhile, the new colonial economic policy had triggered the growth in the market-forming elements, which were; the management system, places, trading subjects, commodities, and trading activities.

Keywords: *Pacht, Market, Fonds*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perkembangan Pasar Pontianak dalam perubahan sistem pengelolaan pada masa kolonial. Tujuan dari kajian ini untuk menganalisis latar belakang penghapusan *pacht* pasar pada tahun 1919 dan akibatnya setelah ditangani langsung oleh pemerintah kota melalui lembaga *pasarfonds*. Untuk mengungkapkannya digunakan metode penelitian sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah pegawai dan kekhawatiran pemerintah kolonial akan kekuatan politik baru yang dibangun melalui kekuatan ekonomi masyarakat Tionghoa selaku penggerak utama perdagangan di pasar. Sementara itu, kebijakan ekonomi kolonial yang baru telah mengembangkan elemen pembentuk pasar, yaitu sistem pengelolaan, lokasi dan bangunan, pelaku perdagangan, komoditas, dan aktivitas perdagangan.

Kata kunci: *Pacht, Pasar, Fonds*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pontianak berada di jalur perdagangan Laut Cina Selatan.¹ Potensi geografisnya sudah disadari sejak muara sungai Kapuas ini dibuka sebagai daerah baru oleh Syarif Abdurrahman Alqadrie,

sultan pertama Pontianak. Setelah Belanda berhasil “menaklukkan,” kegiatan perdagangan dan pelayaran dijadikan sebagai sandaran ekonomi kota Pontianak. Bahkan, ketika Singapura ditetapkan sebagai pelabuhan bebas oleh Inggris, Pontianak sempat dibuka sebagai pelabuhan bebas oleh Belanda untuk menghadapinya.

Selain perdagangan internasional yang difasilitasi oleh pelabuhan pemerintah, perdagangan sungai juga diaktifkan oleh masyarakat melalui pelabuhan rakyat (seorang elite Tionghoa bernama Teng Seng Hie diberi kesempatan oleh pemerintah kolonial). Kedua pelabuhan bersinergi untuk mempertemukan komoditas impor-ekspor. Pasar Pontianak adalah wadah yang dibangun untuk memfasilitasi kegiatan ekspor-impor pemerintah tersebut.

Keberhasilan ekonomi kaum kolonial di sebagian besar wilayah Hindia Belanda dibangun bersama orang Tionghoa. Walaupun pemerintah Hindia Belanda mampu menanamkan kekuasaan politiknya di Pontianak, mereka tidak sepenuhnya mampu mengurus persoalan-persoalan ekonomi, termasuk pengelolaan pasar. Oleh karena itu, perlu diterapkan *pacht* pasar, yaitu sebuah sistem yang telah dipraktikkan dan sukses sejak masa VOC di Batavia. Hal tersebut juga dipertahankan selama abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda.

Sistem tersebut dihapuskan pada awal abad ke-20, yang ditandai dengan penanganan langsung pemerintah kota melalui lembaga baru bernama *pasarfonds* dan pengeralihan lembaga kota lainnya. Hal tersebut tidak serta merta melepaskan pengaruh kalangan Tionghoa. Sejumlah lembaga masyarakat Tionghoa tetap dilibatkan untuk menangani beberapa permasalahan pasar.

Sinergi antara pemerintah kolonial dan masyarakat Tionghoa dalam membangun wilayah utama pertahanan Belanda di Borneo Barat ini menarik untuk dilihat. Kemitraan tersebut merupakan model konstruksi sosial yang dikenal dengan *Sino-European co-colonization*.² Selain itu, tulisan tentang pasar dalam bentuk historiografi belum banyak dilakukan.

Perumusan Masalah

Berlakunya sebuah sistem pengelolaan pasar bukanlah sesuatu yang tiba-tiba melainkan ada penyebabnya. Aplikasi dari sistem baru tersebut juga akan menimbulkan gerak sejarah yang menyebabkan perubahan. Untuk mengungkap latar belakang dari perubahan sistem pengelolaan Pasar Pontianak dan akibat dari pemberlakuannya, penulis merumuskan permasalahan utama yang akan dibicarakan, yaitu

- 1) Mengapa pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan baru atas pengelolaan Pasar Pontianak?
- 2) Bagaimana perkembangan Pasar Pontianak pada masa kolonial?

Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah

- 1) menganalisis sebab dari perubahan sistem pengelolaan Pasar Pontianak masa kolonial,
- 2) membahas perkembangan Pasar Pontianak setelah berakhirnya *pacht* pasar.

Kerangka Konseptual

Penggunaan konsep dan teori ilmu sosial, khususnya ekonomi pada tulisan ini, membantu penulis dalam membentuk kerangka pemikiran saat menjalani penelitian dan penulisan. Secara umum, untuk menganalisis dan memperkuat penjelasan historis, studi ini menggunakan konsep tentang pasar. Konsep tersebut memiliki daya penjabar untuk melihat setiap elemen yang berubah.

Konsep yang digunakan dalam menguraikan perkembangan Pasar Pontianak adalah konsep pasar nyata yang didefinisikan oleh Winardi³ sebagai tempat pembeli dan penjual berkumpul untuk memperdagangkan benda-benda yang terdapat di sana. Berdasarkan konsep tersebut, penulis merumuskan unsur-unsur pembentuk pasar, yaitu tempat dalam arti pasar, yang meliputi lokasi dan bangunan fisiknya; penjual dan pembeli; aktivitas perdagangan yang mencakup waktu berlangsungnya perdagangan, transaksi yang terjadi, dan aktivitas perdagangan secara keseluruhan.

Istilah Cina dan Tionghoa akan diterapkan sesuai dengan zamannya untuk menghindari anakronisme (ketidakcocokan menurut waktu). Istilah Cina digunakan saat membicarakannya pada abad ke-18 dan ke-19. Memasuki awal abad ke-20, digunakan istilah Tionghoa sebagaimana yang ditemukan pada surat kabar lokal pada masa itu, seperti *Halilintar* dan *Borneo Barat*. Lebih lanjut, tulisan ini akan menggunakan kedua istilah itu berselang-seling bergantung pada konteksnya,

yakni Tionghoa untuk masyarakat dan Cina untuk menyertai penyebutan kampung atau pasar.

Istilah Cina dan Tionghoa sama-sama memiliki sejarah panjang dan mengalami dinamika dalam penggunaannya di negeri asalnya. Istilah Cina lebih banyak digunakan oleh orang asing, terutama orang Eropa dan Jepang, karena istilah tersebut banyak ditemukan pada dokumen kolonial. Sementara itu, Tionghoa dikembangkan oleh warga keturunan Tiongkok Selatan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Sebagai bentuk perlawanan terhadap dinasti yang berkuasa, mereka membentuk solidaritas untuk membangun negara yang demokratis dan kuat dengan paham nasionalisme.⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini secara efektif dilakukan sepanjang tahun 2005. Sebagian besar waktu dialokasikan untuk pengumpulan data di Jakarta dan Pontianak. Akan tetapi, penyusunan karya tulis ini sendiri dijalankan dari bulan Oktober–November 2012 di Pontianak dan Cibinong. Metode yang dilakukan adalah metode penelitian sejarah yang mencakup tahap *heuristik*, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Heuristik, yakni mencari, menemukan, dan menghimpun sumber sejarah yang dilakukan melalui studi pustaka, pengamatan lapangan, dan wawancara. Studi pustaka memberi sumbangan data terbesar. Data primer adalah laporan yang banyak dimuat dalam dokumen kolonial dan laporan langsung dari media masa sezaman. Data sekunder berupa monografi dan artikel sezaman. Kedua jenis data tersebut didapatkan dari Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional RI. Pengamatan lapangan, khususnya di kawasan pasar, memberi gambaran nyata aktivitas perdagangan. Kondisi fisik, baik pasar maupun kantor pelabuhan yang masih terjaga walaupun dalam kondisi kurang baik, merupakan artefak yang harus didokumentasikan keberadaan dan fungsinya. Sementara itu, wawancara tetap dilakukan agar dapat menggali ingatan para pelaku perdagangan pada masa kolonial. Walaupun hanya mendapat data sekunder karena sumber primer telah tiada, memori diturunkan terhadap generasi selanjutnya, yakni warga kota, khususnya Tionghoa, yang mengurai kisah nyata kehidupan di pasar.

Berikutnya adalah tahap analisis data berupa kritik atau verifikasi terhadap fisik (kritik eksternal) dan kandungan nilai dari sumber agar memperoleh fakta sejarah yang otentik dan dapat dipercaya (kritik eksternal). Kritik eksternal dilakukan dengan mengamati wujud kertas, tinta, dan membandingkan bentuk tulisan dan perubahannya sesuai trend zaman. Kritik internal yang dilakukan dalam menyusun tulisan ini adalah membandingkan kesesuaian teks pada naskah dengan identitas waktu yang termuat pada dokumen (kolofon), menelusuri identitas penulis dokumen guna menilai kredibilitas sumber, menguji pemaknaan konsep (terutama istilah Belanda) dengan realitas fakta pada zamannya, dan koraborasi (membandingkan dua atau lebih sumber) guna memperkuat pernyataan.

Fakta teruji lalu diinterpretasi dan dirangkai menjadi kesatuan peristiwa sejarah secara kronologis sehingga harmonis dan masuk akal. Penafsiran dan penyusunan pembahasan dituntun dan dikerangkai oleh konsep pasar nyata di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berawal dari Kampung Cina

Kedudukan Belanda di Pontianak ditetapkan pertama kalinya dalam sebuah “Perjanjian Peneguhan Kekuasaan” (*Acta van Investiture*) pada 5 Juli 1779. Melalui kontrak dengan pihak Kesultanan Pontianak, VOC mendapat tanah seluas 1.000 pal (1 pal disetarakan dengan 1.506,94 meter)⁵ yang disebut *Duizend Vierkanten Paal* atau Tanah Seribu.⁴ Di sana, Kompeni membangun benteng kecil, kantor perwakilan dagang, dan menempatkan sebuah sekunar (semacam kapal perang) untuk menjaga lalulintas perdagangan di sepanjang sungai Kapuas. Setiap sarana tersebut dilengkapi dengan personil pendukung.⁷

Keberadaan pegawai VOC menimbulkan kebutuhan akan pemenuhan hidup. Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pasar terapung, yang sifatnya temporer, sehingga mendorong terbentuknya permukiman Cina sebagai pemasok barang secara reguler dan menetap. Di sisi lain, bandar dagang Pontianak telah menarik kedatangan migran Tiociu dari Provinsi Kwangtung dan Hakkian melalui Pemangkat, sebuah kota

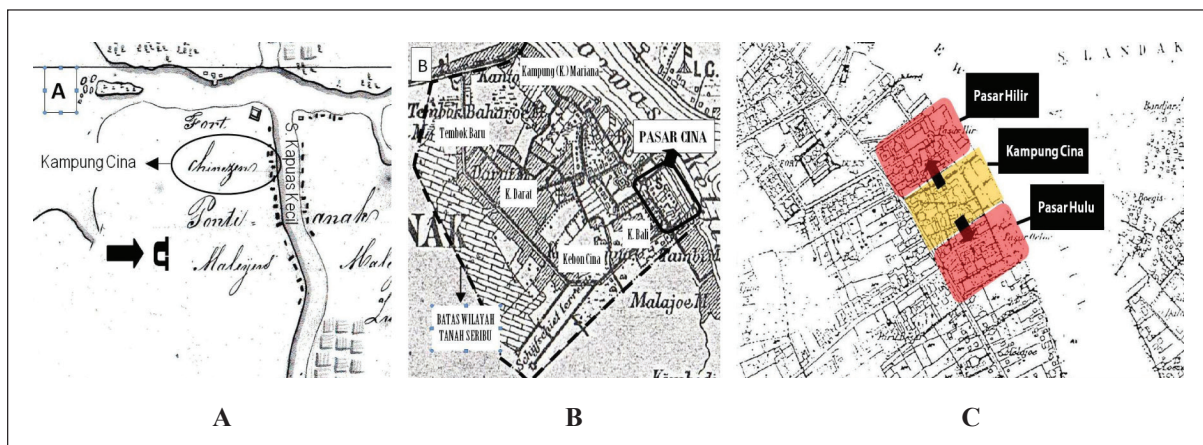
kecil di pesisir barat Borneo.⁸ Pemerintah Hindia Belanda menyadari pentingnya peran orang Cina sebagai perantara dalam melancarkan kepentingan ekonominya. Keinginan itu disambut oleh pemerintah dengan menarik dan memperbolehkan mereka untuk bermukim dan berdagang di daerah kekuasaannya.

Rumah-rumah Cina yang berdiri di dekat markas pertahanan Belanda tergambar asri dengan kebun sayur dan buah di sekitarnya. Permukiman awal ini berupa rumah deret satu atap dan saling berhadapan antara deret yang satu dengan lainnya. Selanjutnya, permukiman itu disebut sebagai Pasar Tengah setelah perluasan di akhir abad ke-19. Konsep bangunan khas Pecinan, yang disebut dengan istilah *winkel wijken* atau kampung toko ini, masih dipertahankan hingga renovasi pada awal abad ke-20. Adapun bangunan rumah berdinding kayu disusun sirih dengan atap daun rumbia (sagu) sejak awal telah digunakan sebagai tempat berdagang. Hingga tahun 1850-an, komoditas utamanya adalah hasil bumi dan barang-barang kelontong produksi Cina dan Eropa dan diperdagangkan hingga sore hari.⁷

Berakhirnya *Pacht* Pasar

Pasca kepergian VOC pada 1791, Belanda datang atas undangan Sultan Pontianak pada 21 Juli 1818. Pada tahun yang sama, pemerintah Hindia Belanda sebagai pewaris aset VOC mendirikan sebuah kantor permanen, termasuk markas pertahanan.⁷ Pembangunan infrastruktur diikuti oleh peningkatan jumlah pegawai, terutama dari kalangan orang Eropa yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Kala pemerintah kolonial datang, Kampung Cina telah tumbuh sebagai pasar. Setidaknya begitulah yang dikatakan J. Burn, seorang petua-lang Inggris yang tinggal di Pontianak pada 1808 sampai 1811 meskipun mungkin dalam bentuk yang lebih sederhana.²¹ Keberadaan pasar menjadi semakin penting dengan meningkatnya jumlah dan ragam kebutuhan hidup masyarakat seiring masuk dan bermukimnya para pendatang dari berbagai etnis. Sebagai tambahan, kegiatan ekspor impor di pelabuhan pemerintah, perdagangan antar pulau, dan pedalaman di pelabuhan rakyat juga membutuhkan wadah untuk menyimpan



Gambar 1. A) Kampung Cina pada tahun 1822 (sumber: Arsip Nasional RI),⁹ B) Kampung Cina pada 1886 tidak diidentifikasi sebagai permukiman melainkan kawasan niaga (sumber: Perpustakaan Nasional RI),¹⁰ C) Peta peluasan Pasar Pontianak tahun 1895 terlihat penamaan ketiga bagian pasar.¹¹

Tabel 1. Jumlah Penduduk Eropa di Kota Pontianak

Tahun	Sebelum 1800	1829	1832	1838	1843	1839	1880	1901	1905	1920	1930
Penduduk Sipil Eropa	-	10 ¹²	15	22 ¹³	31 ¹⁴	33 ¹⁵	19 ¹⁶	-	-	-	-
Pegawai Pemerintah	90 ⁷	-	10 ³	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	90 ⁷	-	118 ⁷	-	-	-	-	186 ¹⁷	223 ¹⁸	425 ¹⁹	541 ²⁰

Keterangan: berdasarkan tabel, diperkirakan bahwa jumlah pegawai mengambil porsi sekitar 85% dari keseluruhan penduduk Eropa.

barang dan memperdagangkannya. Dalam perkembangannya, jelas terlihat bahwa pada tahun 1880-an, Kampung Cina tidak diidentifikasi sebagai permukiman melainkan kawasan niaga.¹¹ Sejak itu, kebutuhan akan pengelolaan sebuah pasar muncul. Akan tetapi, minimnya personil diatasi pemerintah dengan pemberlakuan sistem *pacht* pasar.

Sistem *pacht* (*pachtstelsel*) adalah hak borong.¹³ Sebagian kalangan memaknai sistem *pacht* sebagai penjualan monopoli atau hak pajak penguasa politik kepada para pedagang (sebagian besar Tionghoa). Akan tetapi, para sejarawan memiliki definisi tersendiri.

*Sistem pacht (revenue farming) adalah sebuah sistem di mana negara disewakan, melalui lelang kepada penawar tertinggi, hak monopoli untuk melakukan layanan tertentu, mengumpulkan pajak pada khususnya atau untuk terlibat dalam kegiatan tertentu untuk mencari keuntungan berimbang dengan penetapan harga terlebih dahulu kepada negara secara rutin.*²

Sebagai institusi fiskal yang dimodifikasi, dilembagakan, dan diperluas, sistem ini menjadi solusi atas persoalan kekurangan sumber daya manusia dan hambatan administratif dalam pengumpulan pajak. Sistem yang disebut pula sebagai sistem bandar¹⁴ ini terbukti menyumbang pemasukan pajak bagi kas negara dan dipertahankan untuk agenda politik pemerintah kolonial.¹⁵

Sementara itu, pemegang *pacht* dapat dimaknai sebagai makelar dari *pacht*. Melalui acara tawar-menawar, calon-calon bandar yang merupakan elite kaya dan berpengaruh di antara masyarakat Tionghoa bersaing untuk berhak menjadi *pachter*. *Pachter* pemenang tender memperoleh *pacht* selama setahun (*jaarlijkschepachtsom*). Selain kewenangan dalam menyewakan ruko, *pachter* pasar berkuasa membuat aturan, mengawasi pasar, dan menarik cukai barang (kecuali bagi komoditas unggulan, seperti garam, kopra, dan karet).¹⁶

Pacht pasar dilelang pertama kali pada masa pemerintahan Hindia Belanda di kota-kota penting pantai utara Jawa tahun 1817. Akan tetapi, sistem lelang baru dikembangkan di kota-kota pedalaman pada 1826 dan diterapkan hampir di seluruh keresidenan di Jawa pada 1846.² Kemungkinan besar, *pacht* pasar baru diterapkan di Pasar Pontianak pada pertengahan

kedua abad ke-19. Dugaan tersebut didasari oleh perluasan wilayah pasar pada 1800-an. Perluasan dilakukan ke sebelah barat (hulu) dan timur (hilir) Kampung Cina. Keterangan arah secara lokal mendasari penamaannya, yaitu Pasar Oeloe (Pasar Hulu) dan Pasar Ilir (Pasar Hilir).¹⁷ Adapun wilayah awal pasar (Kampung Cina) dikenal dengan Pasar Tengah. Penyebutan Pasar Tengah, selain terbentuk karena letaknya yang berada di tengah-tengah kawasan pasar, juga dikarenakan fungsinya sebagai pasar sentral (*central market*). Sebutan Pasar Tengah masih abadi hingga kini dan diketahui secara jelas melalui penamaan jalan Pasar Tengah (Pasar Tengah *Weg*) pada peta kota tahun 1934.¹⁸ Secara keseluruhan, ketiga area pasar dikenal dengan sebutan Pasar Cina.

Perkembangan pasar terkait erat dengan kehidupan ekonomi Kota Pontianak. Masyarakat Tionghoa, sebagai kunci perekonomian kota, menguasai jejaring perdagangan baik di daerah *hinterland* maupun mancanegara, terutama Singapura sehingga otomatis mengalami peningkatan ekonomi. Sebagaimana di Jawa dan beberapa daerah di Asia Tenggara, praktik *pacht* yang didominasi oleh orang Tionghoa telah membentuk sebuah elite bisnis. Wujud berupa kesejahteraan yang mencolok dan gaya hidup ekstravaganza membuat pemerintah kolonial khawatir. Pemerintah akhirnya menyadari telah memberikan kewenangan terlalu besar kepada orang Tionghoa, tetapi sebaliknya telah merusak otoritas pemerintah dan kredibilitas sistem hukum.²

Gejala pembentukan kekuatan politik dengan modal kekuatan ekonomi masyarakat Tionghoa mulai terlihat di Pasar Pontianak pada tahun 1918. Organisasi terselubung dalam bentuk organisasi pemakaman atau kesusastaan disinyalir hendak memberontak. Setahun setelah itu, pemerintah Keresidenan Borneo Barat menghapuskan sistem *pacht* secara bertahap.¹⁹

Pengelolaan Pasar oleh *Pasarfonds*

Sistem *pacht* berakhir seiring dengan masuknya Hindia Belanda ke zaman baru. Pada saat itu, daerah kolonialis Belanda dikelola menjadi negara modern. Perkembangan transportasi, telekomunikasi, teknologi percetakan, dan keterlibatan khalayak luas menjadi perhatian

parlemen Belanda, terutama memasuki abad ke-20, dan pemerintah lebih serius meningkatkan pendapatan negara. Berubahnya kebijakan fiskal membuat negara koloni tidak lagi mengandalkan pajak, melainkan mengeksploitasi SDA dan SDM pribumi. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan budi daya tanaman atau hasil bumi laku jual di dunia (*cash crop*). Kebijakan ekonomi tersebut dibarengi kebijakan moneter yang berpengaruh pada transaksi keuangan di Pasar Pontianak.

Seiring dengan pemberlakuan politik balas budi (politik etis), kebijakan di bidang pendidikan, seperti pembukaan sekolah-sekolah pada awal abad ke-20 memengaruhi komunikasi dagang di Pasar Pontianak, baik secara verbal maupun tekstual, dengan berdirinya media massa lokal yang dicetak di percetakan yang berada di wilayah Pasar Pontianak sendiri. Secara umum, modernisasi negeri koloni akan tergambar dalam uraian perkembangan Pasar Pontianak pada awal abad ke-20 saat *pasarfonds* diberlakukan.

Pasar Pontianak adalah sarana untuk mempercepat modernisasi di bidang ekonomi. Guna melancarkan tujuannya, pemerintah kota (*plaatselijk bestuur*) mengelola langsung Pasar Pontianak. Konversi sistem pengelolaan pasar mengarah pada pembangunan sistem perpajakan modern. Dengan begitu, peran utama *pachter* Cina sebagai penarik pajak pasar diambil alih oleh pemerintah melalui *pasarfonds*.¹

Pasarfonds adalah badan pengelola pasar yang dipimpin langsung oleh asisten residen (kepala pemerintah Kota Pontianak). *Pasarfonds* memiliki wewenang hukum, mulai dari mengurus izin pembukaan toko atau perusahaan dagang,²⁰ membuat aturan baik menyangkut aktivitas perdagangan maupun perilaku para pemukim di pasar, misalnya larangan menggunakan lantai dua untuk memasak karena kerap menimbulkan kebakaran,²¹ dan menjaga harga (*prijs bewaking*) yang mencakup menjaga, mengawasi, dan menentukan harga.²²

Dalam merumuskan aturan, *pasarfonds* melibatkan perkumpulan dagang masyarakat Tionghoa bernama *Vereeniging Siang Hwee* (VSH). Organisasi ini memiliki semangat untuk memperkuat dan menyejajarkan posisi sosial masyarakat Tionghoa dengan Eropa²⁰ dan bertujuan agar suara para pedagang Tionghoa

dapat difasilitasi untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Persoalan pasar mulai dari tata tertib dan administrasi, pemberian lisensi judi, sewa pasar, iuran pompa, iuran lampu, uang kebersihan, hingga perkelahian antarwarga juga dipecahkan dalam rapat bersama kedua belah pihak.^{13, 14}

Secara praktis, *pasarfonds* menugaskan seorang mantri pasar untuk bertanggung jawab atas segala aktivitas di seluruh kompleks Pasar Pontianak.¹³ Ia membawahi mandor-mandor pasar yang bertugas di setiap blok pasar.¹⁵ Selain bertugas mengawasi, mandor menjaga kegiatan perdagangan, ketertiban, keamanan, kebersihan, serta memungut retribusi dan sewa pasar.¹⁶ Untuk menjaga keamanan, mandor dibantu oleh polisi (*oppas politie*).¹⁷

Masuknya campur tangan *pasarfonds* memengaruhi perkembangan Pasar Pontianak. Wajah Pasar Pontianak berubah dengan larangan penggunaan kayu sebagai bahan utama bangunan.¹⁸ Daun sagu, kajang, dan rumbia sebagai bahan atap diganti menjadi atap sirap. Pembuatan bak air di lantai dasar sebagai pengganti tong penampung air hujan telah mengubah struktur bangunan ruko.²³ Tinggi bangunan juga tidak boleh lebih dari delapan meter. Tujuannya agar tidak menghalangi daya pantau militer dari Benteng Du Bus terhadap lalu lintas sungai Kapuas, terutama Istana Kesultanan Pontianak di seberang sungai.²⁴

Renovasi besar-besaran dilakukan dengan membangun satu blok baru di area Pasar Tengah pada tahun 1927–1928.²³ Kemudian, di area Pasar Oeloe dilakukan renovasi terhadap lebih dari 250 ruko pada tahun 1930.²⁵ Pembangunan kembali ruko-ruko pasar yang diselenggarakan oleh *pasarfonds* atas biaya lembaga dana kota (*plaatselijk fonds*)²³ meningkatkan jumlah ruko.

Besarnya jumlah ruko membuka peluang masuknya pedagang dari luar komunitas pemukim Tionghoa menjadi semakin besar. Pasar Pontianak yang semula pedagangnya cenderung homogen menjadi heterogen. Mulai tahun 1920-an, orang Arab dan Jepang ikut ambil bagian dalam memperdagangkan barang di ruko-ruko pasar. Sementara itu, orang Eropa lebih banyak menjadikan ruko sebagai kantor-kantor dagang seiring dengan berkembangnya perdagangan ekspor-impor.^{26, 27}

Para pembeli awal hanyalah penduduk di sekitar Kampung Cina yang perlu memenuhi



Gambar 2. A) rumah kayu di Pasar Pontianak tahun 1926,³⁰ B) rumah batu di Pasar Pontianak tahun 1950an (sumber: koleksi Marius AP.)

kebutuhan hidup sehari-hari, yakni pegawai pemerintah Belanda dan penduduk Bugis, Melayu, Dayak, dan Cina.¹⁰ Aktivitas pasar diramaikan oleh pemasok untuk pasar yang sekaligus membeli barang untuk dijual kembali di daerahnya. Hingga tahun 1850-an, tercatat telah datang pembeli dari Jawa, Palembang, Cina, Singapura, Riau, Belitung, dan Eropa.⁷

Pembeli lokal diduga berkembang sekitar tahun 1880. Sejak itu, orang Jawa, Tambelan, Serasan, Banjar, Kuantan, Sulawesi, serta sedikit orang Kamboja, dan Saigon (Vietnam) telah membentuk permukiman di sekitar pasar.²⁸ Sejak abad ke-20, orang-orang Jepang dan Eropa (selain Belanda), meskipun hanya sebagian kecil, telah bermukim sehingga sepertinya sudah menjadi pembeli lokal Pasar Pontianak.²⁷ Sementara itu, pembeli dari luar daerah datang dari Pantai Timur Sumatra, Serawak, Siam, dan Australia.²⁹

Perkembangan lainnya terjadi pada aktivitas di pasar setelah *pasarfonds* menyelenggarakan pasar malam, Pasar Pontianak hidup hampir 24 jam sehari. Para pedagang Tionghoa, yang percaya bahwa rezeki datang di pagi hari, mulai berdagang pada dini hari hingga sore hari, kemudian dilanjutkan oleh pedagang kaki lima. Warung tenda tidak permanen milik pedagang kaki lima didirikan di sepanjang jalan pasar hingga pukul dua belas malam.^{7,29}

Transaksi perdagangan di Pasar Pontianak seringkali dilakukan dengan bahasa bisu (*silent trading*). Seorang informan menyatakan bahwa keterbatasan kemampuan penggunaan bahasa menghambat komunikasi verbal an-

tara penjual dan pembeli. Alhasil, penawaran dilakukan dengan meletakkan daftar harga atau dibantu oleh para pekerja Melayu, walaupun tidak semua melakukannya. Perdagangan bisu mulai berkurang setelah diselenggarakannya sekolah untuk orang-orang Tionghoa. Dimasukkannya bahasa Melayu sebagai salah satu mata pelajaran *Holland Chinesche School*, yang didirikan pada 1912, mendorong perkembangan komunikasi perdagangan di Pasar Pontianak.

Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi perdagangan merupakan faktor penting dalam transaksi perdagangan. Komunikasi perdagangan nonverbal melalui promosi banyak dilakukan. Hampir seluruh kolom iklan di surat kabar-surat kabar lokal dipenuhi oleh komoditas barang dan jasa yang tersedia di Pasar Pontianak. Selain itu, harga-harga baru disiarkan kepada kepala kampung atau demang.³¹

Adapun penggunaan alat tukar dalam transaksi dagang juga berubah. Semula, alat tukar yang digunakan cukup beragam. Mata uang Cina yang disebut *cash* (*cas* menurut orang Melayu),³² uang logam VOC, *florin* (*gulden*), *ringgit*, *ropijen*, dan *dollar* digunakan bersama-sama.⁶ Setelah Javasche Bank didirikan di Pontianak pada 1905,³³ *gulden* ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah, walaupun pada kenyataannya, dengan standar nilai tertentu (dalam *gulden*), *ringgit* dan *ropijen* masih dapat digunakan dan diperoleh di Javasche Bank, Kantor Pos, dan kantor kas pemerintah (*s'landkas*).^{34, 35} Sejak itu, promosi niaga Pasar Pontianak ditawarkan dalam mata uang *gulden*, begitu juga tarif sewa ruko.^{17, 36}

Komoditas jasa yang ditawarkan di Pasar Pontianak sangat beragam, termasuk jasa yang bersifat personal, seperti salon Oesman Thanikod-die Barbie milik keturunan Arab.⁴⁰ Ada pula jasa

Ragam komoditas yang tersedia di Pasar Pontianak, baik yang berasal dari Borneo Barat maupun dari daerah-daerah nusantara dan luar negeri, menggambarkan minat dan kebutuhan masyarakat. Hal itu sekaligus menunjukkan perkembangan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat kota Pontianak. Toko-toko yang telah diuraikan menggambarkan perkembangan bentuk perusahaan dagang dan pedagang di Pasar Pontianak.

KABAR PERNIAGAAN		ROTTAN	
Pasar Pontianak			
BAGIAN I			
GETAH RABA			
	Harga		
Blanket B.	per. 100 K. O.	Rong Djerman haloes	/ 3.—
C	/ 25.50	Kasar	/ 3.—
Bark Crepe	• 25.—	Sabot	• 3.—
Smoked Sheets	• 29.—	Roenll	• 4.75
Slabs 80 pCt. kering	• 19.—	Sega	• 4.50
Scraps 60 pCt. kering	• 7.50	Sega air	• 3.—
Getah Djelotoeng No. 1	• 8.75	Balah (gespleet)	• —
No. 2	• 7.50	Paldas (haloes)	• —
• Djoeangkang No. 1	• 18.—	LILIN LERAH	
No. 2	• 15.—	No. 1 koening besar	• 55.—
• merah No. 1	• 50.—	No. 2 koening besar	• 45.—
No. 2	• 45.—	No. 3 tidak koening besar	• —
		No. 4	• kator
		BERAS	
		Siam No. 1	/ 12.50
		No. 2	/ 11.50
		No. 3	/ 10.—
		Paus No. 1	
		No. 2	/ 10.—
		Djawa Besar (haloes)	/ 10.—
		• (ho eng)	/ 10.—
		• (pek tjan)	/ 10.—
		• (tolosan)	/ 8.50
		Gela Besar	
		Kopi biji	/ 34.—
		Tepeeng gendom	/ 16.—
		Katuing tanah	/ 11.15
		Kentang	/ 20.—
		Mijak kelapa 1 botol	/ 0.15
		BAGIAN II	
		Getah Raba	p. 100 Kg
		Blanket "B"	/ 27.—
		• "C"	/ 26.50
		• "D"	/ 23.50
		Bark crepe	/ 17.—
		Smoked Sheets	/ 27.50
		Slabs 80pCt	/ 18.50
		Air dried Sheets	/ 22.50
		Ongedr. Sheets 80pCt	/ 11.25
		Coucou	/ —

Gambar 3. Kabar Perniagaan Pasar Pontianak³⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Perubahan sistem pengelolaan Pasar Pontianak disebabkan tiga hal utama. Pertama, modernisasi tata kelola administrasi dan pemerintahan kolonial. Kedua, meningkatnya jumlah pegawai pemerintah Belanda. Ketiga, pemerintah Belanda merasa terancam oleh kekuatan politik orang Tionghoa yang berdasarkan kekuatan ekonomi.
- 2) Perubahan sistem pengelolaan pasar memengaruhi perkembangan pasar. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan setiap unsur pasar, yakni sistem pengelolaan, tempat, pelaku perdagangan, aktivitas perdagangan, dan komoditas. Komponen-komponen tersebut memiliki hubungan kait satu sama lain.

Saran

Pasar merupakan tempat penting dalam aktivitas ekonomi suatu masyarakat. Pasar Pontianak adalah pasar di dalam kota pusat pemerintahan yang sangat erat kaitannya dengan sifat corak kehidupan ekonomi kota sungai tersebut. Keberadaan Pasar Pontianak, sejak akhir abad ke-18 hingga tahun 2012, berperan untuk mengembangkan perekonomian suatu kota Pontianak. Oleh karena itu, pemeliharaan dan penataan *landmark* ekonomi kota Pontianak yang sempat dilakukan oleh pemerintah kota harus dilakukan secara berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Johanis Haba atas ilmu dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan KTI.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹Poelinggomang, E.L. 2002. *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: KPG.
- ²Wahid, A. 2010. In the Shadow of Opium: The Pachtstelsel and The Political Economy of Colonial Extractions in Java, 1850s–1890s. *Makalah dalam Workshop Colonial Extractions in the Netherlands Indies and Belgian Congo*. Utrecht: Utrecht University.

- ³Winardi. 1985. *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi*. Bandung: Tarsito.
- ⁴Tan, M.G. (ed.). 2008. *Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- ⁵*Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-Indie*, 1898.
- ⁶Rahman, Ansar et al. 2000. *Syarif Abdurrahman Alkadri; Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*. Pontianak: Romeo Grafika.
- ⁷Veth, P.J. 1854. *Borneo's Wester Afdeeling; Geographisch, Statistisch, Historisch*. Zaltbommel.
- ⁸Heryanto. 2002. *Perkawinan Semarga pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak*. Tesis, Fakultas Hukum. Semarang: Universitas Diponegoro.
- ⁹Topographisch Bureau. 1889. *Residentie Wester-Afdeeling van Borneo 1886–1888*.
- ¹⁰Bureau der Directoraat van Militair Commissie. 1826. *Schets van een Gedeelte der West Kuste Borneo en het Rivier Kapuas van Pontianak tot Mampawa*.
- ¹¹Heidhues, M.S. 2003. *Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di Distrik Tionghoa Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Nabil.
- ¹²Lohanda, M. 2000. *The Kapitan Cina of Batavia*. Jakarta: Djambatan.
- ¹³*Halilintar* No.6, 1923: 3.
- ¹⁴*Halilintar* No.22, 1923: 4.
- ¹⁵*Warta Borneo*, 6 Desember 1924: lampiran no.1.
- ¹⁶*Matahari Borneo*, 19 September 1929: 1.
- ¹⁷*Borneo Barat*, 15 September 1936: 2.
- ¹⁸*Halilintar* No. 37, 1923: 1.
- ¹⁹James, K.A. 1921. *Memorie van Overgave*.
- ²⁰*Matahari Borneo*, 28 Oktober 1928: 4.
- ²¹*Berani*, 25 Juli 1925: 1.
- ²²*Borneo Barat* No. 103, 1941: 1–2.
- ²³*Oetoesan Borneo*, 11 April 1928: 2.
- ²⁴*Halilintar*, 11 Januari 1925: 2.
- ²⁵*Algemeene Handelsblad voor Nederlandsch-Indie*, 2 Oktober 1930:1
- ²⁶*Halilintar*, 7 Januari 1928: 3.
- ²⁷*Warta Borneo*, 1 November 1924: 4.
- ²⁸Ministerie van Kolonien. 1895. *Kaart van den Vierkanten Paal Gouvernements Gronggebied te Pontianak*.
- ²⁹*Halilintar* No.34, 1924: 2.
- ³⁰Nomor Soeltan Pontianak. *Pandji Pustaka* No.V: 330. 1926.
- ³¹*Borneo Barat*, 11 September 1941: 1.

- ³²Mirza. 1997. *Katalogus Singkat Museum Negeri Kalimantan Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- ³³*Halilintar* No.3, 1928: 1.
- ³⁴*Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, 1941.
- ³⁵*Borneo Barat*, 26 April 1941: 2.
- ³⁶*Halilintar* No.44, 1924: 2.
- ³⁷*Borneo Barat*, 14 Agustus 1937: 3.
- ³⁸*Warta Borneo*, 1 November 1924.
- ³⁹Zondervan, H. 1928. De Economische Ontwikkeling van Nederlandsch-Borneo. *De Indische Gids* I: 617–618.
- ⁴⁰*Halilintar* No. 3, 1923:3.
- ⁴¹*Matahari Borneo*, 24 Oktober 1929: 4.
- ⁴²*Borneo Barat*, 21 Agustus 1941:3.
- ⁴³*Matahari Borneo*, 8 April 1941: 4 .
- ⁴⁴*Halilintar* No.15, 1923: 4.
- ⁴⁵*Berani*, 18 Juli 1925: 8.
- ⁴⁶Uljee, G.L. 1925. *Handboek voor de Residentie Westerafdeeling van Borneo*. Weltevreden: N.V.Boekhandel Visser&Co.

Acuan yang Lain

- Juwono, H. 2012. Hak Konsesi di Tanah Kerajaan: Eksploitasi Tambang di Kulon Progo. *Patrawidya* 13 (1): 1–14.
- Rush, J.R. 2000. *Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860–1910*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Wahid, A. 2012. Revenue Farming and Imperial Transition: An Economic Dimension of Early Colonial State Formation in Java, C. 1800s–1820s. *Humaniora* 24 (3): 255–268.
- Liem Thian Joe. 2004. *Riwayat Semarang*. Jakarta: Hasta Wahana.
- Hoofdkantoor van Scheepvaart*. 1940. *Statistiek van de Scheepvaart in Nederlandsch-Indie over het Jaar 1919–1939*. Weltevreden: Gedrukt bij F.B. Smits.